



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN DEMAK
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59572

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, Agustus 2023

Nomor : 050/

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Verifikasi

Rancangan Akhir Renja

Tahun 2024

Kepada :

Yth. Kepala Bappelitbangda

Kabupaten Demak

di -

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, dengan hormat kami sampaikan permohonan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2024.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN DEMAK

MUH. MUCHLIS, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680721 198903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 65 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kabupaten Demak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2024. Perumusan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 mengakomodir program-program yang ada di PD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk tahun 2024 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024.

Sebagai salah satu PD di Kabupaten Demak, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak ikut serta dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yaitu **“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”**. Serta bila dikaitkan dengan Misi Pembangunan Kabupaten Demak 2021-2026, maka upaya yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak adalah **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.**

Nilai Budaya Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak **“PINTAR”**, yang merupakan akronim dari:

1. **Profesional**, nilai yang diwujudkan dalam perilaku kerja yang selalu berpatokan pada prosedur operasional baku yang digunakan sebagai acuan merencanakan dan melaksanakan pekerjaan serta senantiasa mengembangkan skill, knowledge, dan attitude .
2. **Integritas**, nilai yang diwujudkan dalam bentuk konsistensi antara tindakan dengan norma, system nilai, kewajiban kepatutan;
3. **Akuntabel**, nilai yang terwujud melalui kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban bagi setiap individu maupun organisasi.
4. **Responsif**, nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan tantangan yang ada, serta memfasilitasi secara prima;

Adapun Motto layanan Sekretariat DPRD Kab. Demak adalah “Berpikir Cerdas, Bertindak Tangkas, Bekerja Tuntas”.

Mengacu pada pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Demak tahun 2024 tidak lepas dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Apa yang sudah di capai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah di tetapkan. Artinya, apa yang sudah di capai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki.
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah-masalah yang di hadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Demak.
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Demak untuk Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 serta Program Unggulan Bupati Demak.

2. Sebagai dokumen penjabaran Renstra PD dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024.
3. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2023 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja Perangkat Daerah

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Menguraikan tentang kondisi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2021.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Memuat tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2024 beserta kerangka pendanaannya.
- BAB V Penutup.
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sampai dengan tahun 2022, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya. Adapun seluruh capaian kinerja program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang mana dari program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan, secara umum capaian kinerja dari 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan tersebut dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan anggaran sebesar Rp43.848.169.992,00 dan realisasi sebesar Rp41.563.155.519,00 sehingga capaian realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar 94,79%;
2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terdiri dari 6 kegiatan dan 23 sub kegiatan dan secara umum capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan anggaran Rp24.024.575.803,00 dan realisasi sebesar Rp21.153.323.852,00 sehingga capaian realisasi program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar 88,05%, namun demikian terdapat sub kegiatan

yang tidak tercapai yaitu sub kegiatan kunjungan kerja dalam daerah dari target 60 laporan dan terealisasi 24 laporan, alasan tidak tercapainya sub kegiatan tersebut adalah karena jadwal tersebut menyesuaikan dengan jadwal bamus dan kegiatan dewan sudah difokuskan pada pembahasan perda dikarenakan banyaknya peraturan daerah yang disesuaikan dengan ketentuan di atasnya.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kab. Demak

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026					
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
											(8=7/6)	(9=7))	(10=9/4)
4	02	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		100%	100	100	100	100
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100	100	100	100
4	02	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	5	1	1 dokumen	1	100	1	20
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28	28 orang/bulan	28 orang/bulan	28	100	28	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	60	12 dokumen	12 dokumen	12	100	12	20
4	02	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN	100%	100%	100%	100	100	100	100
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	5	1 paket	1 paket	1	100	1	20
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	550	110 orang	110 orang	110	100	110	20
4	2	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%		100	100%	100	100%	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	10	12	2 paket	2	100	2	20
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	10	2	2 paket	2	100	2	20
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10	2	2 paket	2	100	2	20
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	60	5025	12 dokumen	12	100	12	20
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	444	24	60 laporan	174	300	174	39
4	2	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	90		18 unit	18	100	18	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	35	20	7 unit	7	100	7	20
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	55	20	11 unit	11	100	11	20
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	60	1203	12 laporan	12	100	12	20
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	15	12	3 laporan	3	100	3	20
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	20	12	4 laporan	4	100	4	20

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026		
								Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	170		82 unit	82	82	82	48
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5	24	1 unit	1	100	1	20
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	108	21	24 unit	24	100	24	22
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	7	12	7 unit	7	100	7	100
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi</i>	50	12	50 unit	50	100	50	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Penerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	250		50 orang/bulan	50	100	50	20
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	250	50	50 orang/bulan	50	100	50	20
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25	4	5 paket	5	100	5	20
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	250		50 orang	30	60	30	12
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD yang Disediakan	30		6 laporan	6	100	6	20
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30	19	6 laporan	6	100	6	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
4	02	01	2,16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>	17	12	1 paket	1	100	1	6
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE RENCANA KERJA DPRD YANG DIFASILITASI	80%		76%	82%	82	82%	103
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang diselesaikan	115		23 dokumen	19	83	19	17
4	02	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	5	-	1 dokumen	1	100	1	20
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	75	12	15 dokumen	11	73	11	15

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
4	02	02	2,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>	5	-	1 dokumen	1	100	1	20
4	02	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>	30	6	6 dokumen	6	100	6	20
4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan (KUA PPAS Perubahan, Murni, APBDP dan APBD Murni)	25	-	5 dokumen	5	100	5	20
4	02	02	2,02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>	5	-	1 dokumen	1	100	1	20
4	02	02	2,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	5	-	1 dokumen	1	100	1	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>	5	-	1 dokumen	1	100	1	20
4	02	02	2,02	04	Pembahasan APBD Perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>	5	-	1 dokumen	1	100	1	20
4	02	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	5	-	1 dokumen	1	100	1	20
4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10	-	2 dokumen	2	100	2	20
4	02	02	2,03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK</i>	5	-	1 dokumen	1	100	1	20
4	02	02	2,03	###	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>	5	-	1 dokumen	1	100	1	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	156		31 dokumen	31	100	31	20
4	02	02	2,04	2	Pendalaman Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	30	6	6 dokumen	6	100	6	20
4	02	02	2,04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	60	82	12 dokumen	12	100	12	20
4	02	02	2,04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	31	-	7 orang	7	100	7	23
4	02	02	2,04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	35	-	7 orang	7	100	7	20
4	02	02	2,04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	60	15	12 dokumen	12	100	12	20
4	02	02	2,04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	5	-	1 dokumen	1	100	1	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat	755		151 dokumen	151	100	151	20
4	02	02	2,05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>	300	18	60 laporan	21	35	21	7
4	02	02	2,05	2	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>	5	-	1 dokumen	1	100	1	20
4	02	02	2,05	3	Pelaksanaan Reses	<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	750	150	150 dokumen	150	100	150	20
4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	341	120	71 dokumen	69	97	69	20
4	02	02	2,08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	40	40	8 dokumen	8	100	8	20
4	02	02	2,08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	<i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>	75	48	15 laporan	15	100	15	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021 - 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
4	02	02	2,08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	240	32	48 dokumen	46	96	46	19

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi diharapkan dapat meningkatkan SDM melalui berbagai pelatihan dan BIMTEK, Program Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Mendukung kegiatan DPRD dilakukan melalui pelaksanaan rapat koordinasi internal yang dilaksanakan mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun dalam rangka evaluasi capaian kinerja.

Sampai dengan akhir tahun 2022 kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak diantaranya, alat-alat angkutan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, bangunan gedung, instalasi, dan jaringan telah direalisasikan. Tugas Pokok Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi serta mendukung Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran dan fungsi DPRD yang lebih peka terhadap keinginan masyarakat, lebih aspiratif, informatif dan meningkatnya peran fungsi dewan dalam pengawasan, pembentukan peraturan daerah dan penganggaran melalui program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2022 mengelola anggaran APBD sebesar Rp67.872.745.795,00 Penjabaran anggaran tersebut diantaranya mendukung kinerja DPRD melalui 3 fungsi DPRD yaitu Pengawasan, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penganggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

- a. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- b. Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai *supporting system* yang memfasilitasi kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerjanya tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.
- c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus harus dilakukan penyesuaian.

Pada pembahasan ini akan kami sajikan Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, yang sebagaimana terlampir pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	v	-	-	-	81,50	81,75	82	-	83,93	83,95	84	
2	Presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	v	-	-	-	100	100	100	-	100	100	100	
3	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	v	-	-	-	76,50	76,60	76,70	-	76,21	76,70	76,70	
4	Presentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target	v	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	v	-	-	84	84,10	84,20	84,30	86	86,06	84,30	86,15	

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		Kode Subkegiatan
					Target	Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10=(8/6)*100$	$11=(9/7)*100$	12
N I H I L											

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- f. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- g. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- i. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi diharapkan dapat meningkatkan SDM melalui berbagai pelatihan dan BIMTEK, Program Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Mendukung kegiatan DPRD dilakukan melalui pelaksanaan rapat koordinasi internal yang dilaksanakan mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun dalam rangka evaluasi capaian kinerja.

Sampai dengan akhir tahun 2022 kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak diantaranya, alat-alat angkutan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, bangunan gedung, instalasi, dan jaringan telah direalisasikan. Tugas Pokok Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi serta mendukung Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran dan fungsi DPRD yang lebih peka terhadap keinginan masyarakat, lebih aspiratif, informatif dan meningkatnya peran fungsi dewan dalam pengawasan, pembentukan peraturan daerah dan penganggaran melalui program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2022 mengelola anggaran APBD sebesar Rp67.872.745.795,00 Penjabaran anggaran tersebut diantaranya mendukung kinerja DPRD melalui 3 fungsi DPRD yaitu Pengawasan, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penganggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

- a. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- b. Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai *supporting system* yang memfasilitasi kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerjanya tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.
- c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus harus dilakukan penyesuaian.

Pada pembahasan ini akan kami sajikan Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, yang sebagaimana terlampir pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	v	-	-	-	81,50	81,75	82	-	83,93	83,95	84	
2	Presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	v	-	-	-	100	100	100	-	100	100	100	
3	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	v	-	-	-	76,50	76,60	76,70	-	76,21	76,70	76,70	
4	Presentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target	v	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	v	-	-	84	84,10	84,20	84,30	86	86,06	84,30	86,15	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan hal itu, sebuah konsep diperkenalkan yaitu konsep (*Good Governance*) tata pemerintahan yang baik. *Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani dan pihak swasta.

Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik dan kinerja dari lembaga pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak, pada tahun 2024 mendatang merupakan tahun keempat masa jabatan keanggotaan periode 2019-2024, sehingga Sekretariat DPRD harus dapat menyusun rencana program dan kegiatan yang mendukung kinerja DPRD yang bersinergi dengan visi dan misi Bupati.

Sekretariat DPRD harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum daerah pada tahun anggaran 2024 guna menunjang program-program pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak di tahun 2024 yang adalah menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara serentak. Pemilihan Umum (pemilu) termasuk di dalamnya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pileg dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat,

karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer.

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai fasilitator kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Demak tentunya mengalami dampak terhadap penyelenggaraan pemilu tersebut. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai individu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD secara sosiologis pasti memiliki kedekatan hubungan dengan anggota DPRD. Hal tersebut dimungkinkan adanya sikap dari anggota DPRD untuk menarik ASN untuk ikut terlibat dalam konstelasi kegiatan politik pada pemilu. Di sisi lainnya ASN sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dituntut oleh regulasi untuk bersikap profesional dan menjaga netralitasnya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah diharuskan melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang berhubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode tahun 2019 – 2024 dan dimulainya masa jabatan anggota DPRD periode tahun 2024 – 2029. Kegiatan tersebut antara lain :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD yang didalamnya terdapat pekerjaan penyusunan buku memori DPRD periode tahun 2019 – 2024
2. Layanan Administrasi DPRD yang di dalamnya terdapat pekerjaan untuk menyiapkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRD bilamana mencalonkan sebagai caleg dengan berpindah di partai lain,
3. Fasilitasi Rapat DPRD yang didalamnya terdapat pekerjaan rapat paripurna proses pemberhentian anggota DPRD periode tahun 2019 – 2024, pekerjaan rapat paripurna proses peresmian anggota DPRD periode tahun 2024 – 2029, pekerjaan rapat paripurna proses pelantikan pimpinan DPRD periode tahun 2024 – 2029, pekerjaan rapat-rapat pembentukan alat kelengkapan DPRD periode tahun 2024 – 2029.
4. Penyusunan Tata Tertib DPRD untuk mengatur kegiatan-kegiatan DPRD periode tahun 2024 -2029.

5. Orientasi DPRD untuk pembekalan pengetahuan bidang pemerintahan bagi anggota DPRD periode tahun 2024 – 2029.
6. Penyusunan Kode Etik DPRD sebagai acuan pengawasan etika anggota DPRD periode tahun 2024 – 2029 dan didalamnya juga terdapat pekerjaan penyusunan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Isu strategis berikutnya yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak adalah upayanya dalam memenuhi indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Demak yang salah satunya yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas pelayanan Sekretariat DPRD terutama pada anggota DPRD baru atau periode 2024 – 2029. Secara psikis anggota DPRD baru pastilah memiliki sikap idealisme dan tuntutan terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak yang tinggi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak akan dituntut untuk mengakomodir program rencana kerja yang telah disusun oleh Anggota DPRD periode tahun 2024 – 2029. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Demak di tahun 2024 melakukan perencanaan dan penganggaran dengan menetapkan pagu anggaran pada perangkat daerah sesuai arah kebijakan prioritas daerah di antaranya adalah Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di tahun 2024.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu:

a. Kelembagaan dan Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam melaksanakan fungsi fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD belum optimal, sehingga diperlukan penyelarasan Rencana Kerja DPRD dengan Rencana Kerja Sekretariat DPRD, sehingga seluruh ketugasan anggota DPRD terjabarkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

b. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, baik dari sisi kualitas dan kuantitas.

- c. Pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.
- d. Regulasi
Dinamika peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.
- e. Sarana dan Prasarana
Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana kerja pada tiap-tiap bagian sesuai kebutuhan.

2.3.2 Tantangan dan Peluang

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, terdapat faktor-faktor yang teridentifikasi tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
2. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan.
3. Perubahan regulasi, kebijakan pemerintah, dan produk perundang-undangan yang cukup cepat menyebabkan anggota DPRD harus memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai terhadap dinamika tersebut.
4. Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan

penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat.

5. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.
6. Profesionalisme serta kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

Sedangkan pada sisi peluang, peluang bagi Sekretariat DPRD untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya terdapat faktor-faktor yang melingkupi diantaranya:

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.
2. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan.
3. Kebijakan Reformasi Birokrasi menjadi daya dorong guna mewujudkan perubahan pada mental apartur, organisasi, tata laksana, sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan
4. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD.
5. Terbukanya peluang pengembangan teknologi informasi dan pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada perencanaan awal rencana pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam 2 program dan 17 kegiatan dengan total anggaran rancangan awal Rp64.912.021.508,00 setelah dilakukan pembahasan melalui forum perangkat daerah, anggaran bertambah menjadi Rp66.775.107.959 dan dalam rancangan akhir RKPD menjadi Rp57.947.855.500 Perubahan yang paling banyak terjadi karena menyesuaikan anggaran yang ada, sehingga banyak kegiatan khususnya kegiatan DPRD yang dikurangi diantaranya kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dari Rp34.786.101.152 menjadi Rp31.489.504.148 dan kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan

Aspirasi Masyarakat dari Rp2.891.561.000 menjadi Rp2.046.699.000.

Secara lengkap dan rinci, review terhadap rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Demak disajikan pada Tabel 2.3 dibawah.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SEKRETARIAT DPRD				64.912.012.508					57.947.855.500	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Demak	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	44.829.349.823	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Demak	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	44,330,480,362	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				57.634.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.100.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	900.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 Laporan	55.534.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	12.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting)
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan		4.122.769.797	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dokumen	4.230.819.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang/bulan	3.598.868.997	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.759.855.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	523.900.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	470.964.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Demak	PERSENTASE PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Demak	PERSENTASE PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN			
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				3.395.300	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	3.395.300	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	3.395.300	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan		220.830.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan	1 laporan	179.200.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	18.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	18.200.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 orang	202.630.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	161.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting)
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 persen	678.984.472	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	612.624.366	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.504.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.504.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	187.232.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	210.999.700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	129.000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	36.714.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20,115,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.115.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	75.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.0000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	220.192.772	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	182.351.466	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	12.900.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	12.900.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1 Dokumen	5.040.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1 Dokumen	5.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting)
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Berbasis Elektronik pada SKPD					Berbasis Elektronik pada SKPD			
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan		416.716.440	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan	17 unit	702.970.000	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	702.970.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	89.020.440	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 unit	327.696.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	0	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia		1.374..531.060	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia	100%	1.196.341.714	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	773.431.060	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	558.441.714	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	572.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	622.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting)
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang Terpelihara		1.011.963.602	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang Terpelihara	82 unit	967.265.840	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	99.310.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	80.333.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	339.128.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	339.118.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 unit	81.620.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	81.620.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	315.710.762	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	350.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	41.194.840	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	41.194.840	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	19 unit	120.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	19 Unit	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting)
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi					Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi			
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan DPRD		34.786.101.152	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan DPRD		31.489.504.148	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/ bulan	33.986.965.152	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bul an	30.754.504.148	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	724.136.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	660.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	75.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	75.000.000	
10	Layanan Administrasi DPRD		Terpenuhinya kebutuhan administrasi kegiatan DPRD		2.156.424.000	Layanan Administrasi DPRD		Terpenuhinya kebutuhan administrasi kegiatan DPRD	50 Orang	1.734.820.000	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3 Dokumen	1.000.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3 Dokumen	637.750.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3 Laporan	687.754.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	628.400.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	468.670.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	468.670.000	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	77 persen	20.082.671.685	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi	85%	16.801.815.132	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting)
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.886.187.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang diselesaikan	22 dokumen	3.456.069.500	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	155.422.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	154.300.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 dokumen	2.483.198.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	2.194.482.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	450.817.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	154.300.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 dokumen	703.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	603.000.000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	93.750.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	349.987.500	
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen Pembahasan(KUA PPAS Perubahan,Murni, APBD Perubahan dan APBD Murni)		4.030.417.500	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen Pembahasan(KUA PPAS Perubahan,Murni, APBD Perubahan dan APBD Murni)	5 Dokumen	3.405.446.500	
	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	611.495.500	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	778.111.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	611.495.500	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	778.111.000	
	Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan	1 dokumen	626.841.000	Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan	1 Dokumen	293.002.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting)
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			APBD					APBD			
	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	1 dokumen	1.569.087.000	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	1 Dokumen	778.111.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	611.496.500	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	778.111.000	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		2.180.583.500	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6 dokumen	2.141.214.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 laporan	250,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	209.004.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 laporan	250,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	209.004.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 laporan	250,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	209.004.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 laporan	250,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	209.004.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 laporan	611.496.500	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	652.599.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 laporan	569.087.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	652.599.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting)
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
4	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase meningkatnya kompetensi anggota DPRD		4.595.896.700	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase meningkatnya kompetensi anggota DPRD	31 dokumen	3.985.655.632	
	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	582.312.000	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	485.000.000	
	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 dokumen	2.418.568.000	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	1.663.730.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 dokumen	204.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	204.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	210.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	210.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat tersedianya majalah varia legislatif terselenggaranya hearing	12 dokumen	302.953.200	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat tersedianya majalah varia legislatif terselenggaranya hearing	12 Dokumen	375.303.200	
	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	208.290.000	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	286.589.000	
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 dokumen	669.773.500	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	761.033.432	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat		2.891.561.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat	151 dokumen	2.046.699.000	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	60 laporan	755.000.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	60 Laporan	240.900.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran	1 dokumen	301.166.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran	1 Dokumen	286.589.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting)
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			DPRD yang Disusun					DPRD yang Disusun			
	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 dokumen	1.835.395.000	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100 Dokumen	1.519.210.000	
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Tersusnya kode etik DPRD		273.750.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Tersusnya kode etik DPRD	1 Dokumen	100.000.000	
	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 dokumen	93.750.000	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 dokumen	100.000.000	
	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	180.000.000			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			
7	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Fasilitas Tugas DPRD		2.224.275.985	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Fasilitas Tugas DPRD	56 dokumen	1.666.730.500	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8 Dokumen	1.076.856.985	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8 Dokumen	900.000.000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	15 laporan	349.386.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	15 Laporan	372.214.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48 dokumen	798.033.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48 Dokumen	394.516.500	

1.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2024 di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, terdapat usulan dari pemangku kepentingan /pokir pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD di sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan berupa usulan belanja jasa advetorial media senilai Rp200.000.000,00 dengan besaran nilai Rp2.000.000,00 pada setiap peliputannya, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kab. Demak

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Adventorial Media	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 200.000.000	100 Liputan	DITERIMA

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak terlepas atau tidak dibawah wewenang dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Jendral DPR RI. Walaupun mempunyai tugas dan fungsi yang sama, tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Demak. Sehingga kebijakan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak terlepas dari kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Jendral DPRD RI, dimana kebijakan yang diambil dapat digunakan sebagai wacana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten/kota lainnya.

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “*Optimalisasi Kinerja Pemerintahan sebagai Penyokong Perekonomian daerah yang Berdikari*” Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Percepatan penurunan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
3. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
4. Percepatan penataan kota yang berkualitas dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan ketentraman/ketertiban umum

Provinsi Jawa Tengah pada rancangan RKPD 2024 menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2024 yaitu “*Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari*”, dengan fokus untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Strategi yang dilakukan untuk menjaga

perekonomian daerah tetap positif antara lain:

- a. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- b. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
- c. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Tema RKPD Kabupaten Demak tahun 2024 yaitu *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal*. Berdasarkan penyelarasan dengan kebijakan perekonomian nasional dan provinsi, secara umum arah kebijakan perekonomian dan pembangunan Demak tahun 2024 adalah:

- a. Akselerasi penuntasan program unggulan/program prioritas khususnya program-program yang memiliki multiplier effect ke sektorsektor lain, seperti peningkatan layanan investasi dalam rangka peningkatan kapasitas ekspor daerah, pembangunan infrastruktur di pusat produksi dan destinasi wisata serta pencetakan wirausaha baru dan peningkatan skala UMKM;
- b. Mengupayakan penanganan permasalahan pesisir dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan perbaikan iklim investasi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas pendanaan;
- c. Menjaga iklim kondusivitas selama tahun politik dengan meningkatkan profesionalitas ASN dan sinergitas tokoh masyarakat dan pemuka agama;
- d. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya sesuai standar pelayanan minimal;
- e. Perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan;

f. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting serta perlindungan perempuan dan anak;

Di dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak harus mengacu kepada visi dan misi Bupati Demak. Visi dan misi Bupati Demak diterjemahkan secara nyata dan aplikatif di dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Demak, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak harus menjadi *supporting system* yang profesional dan modern. Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di semua bagian.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Demak diberikan alokasi pagu sebesar Rp57.947.855.500.00 (*lima puluh tujuh miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ratus rupiah*).

Pada tahun 2024, usulan anggaran pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak adalah sebesar Rp64,912,021,508.00 (*enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas ribu dua puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah*) tersebut maka pendekatan efektivitas yang disusun pada tahun 2024 dengan usulan dan ketepatan harus dapat dilaksanakan dengan baik. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran tersaji pada lampiran Tabel Rencana Kerja Tahun 2024. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 telah sesuai dengan kebutuhan.

Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika baik itu perekonomian makro daerah maupun keadaan lainnya yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan penyesuaian terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Demak saat ini, arah kebijakan tersebut menemukan tantangan sekaligus peluangnya. Tantangan yang dihadapi di tahun mendatang yaitu:

a. wilayah pesisir Kabupaten Demak yang berada di jalur pantura sering mengalami rob menyebabkan turunnya minat investor

- untuk membangun tempat produksinya di Kabupaten Demak;
- b. tingkat kemiskinan Kabupaten Demak masih tinggi dan termasuk lokus penanganan kemiskinan ekstrem;
 - c. dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat yang sangat cepat yang harus segera direspon oleh Pemerintah Daerah;

Meskipun demikian, Kabupaten Demak juga memiliki peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi perekonomian, di antaranya:

- a. selesainya pembangunan jalan tol Semarang-Demak dan dimulainya pembangunan tol Demak-Tuban;
- b. Kabupaten Demak masuk dalam jalur revitalisasi kereta api;
- c. Masuknya Demak dalam kawasan *Urban Mobility Plan*;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu dan mendukung Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Sekretariat DPRD Kabupaten Demak mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan serta sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi (a). peyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; (b). penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; (c). fasilitasi penyelenggaraan rapat; (d). penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; (e). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Renja ini disusun dengan maksud untuk menjadi rujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, agar setiap pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD

Kabupaten Demak memahami dengan benar beban tugasnya masing-masing sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara keseluruhan, yang bertujuan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2024
1	Meningkatkan pelayanan publik Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	76,70
	Meningkatnya capaian sasaran Strategis Sekretariat DPRD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD yang mencapai target	100
3	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	86,15

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang diemban.

4.1 Program dan Kegiatan

4.1.1 Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja dan pendanaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak mencakup program-program prioritas maupun non prioritas yang merupakan program pendukung kegiatan DPRD Kabupaten Demak. Indikasi rencana program prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Demak berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka pendek maupun untuk pemenuhan layanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam periode Tahun Anggaran 2024, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan semuanya hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Demak, tidak ada yang bersumber dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Demak.

Program dan Kegiatan Dalam penyusunan Renja 2024 ini terbagi dalam 2 (dua) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi kegiatan
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.
 - 1.3 Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - b. Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi.
 - 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan;
 - f. Fasilitasi kunjungan tamu;
 - g. Penyelenggaraan rapat koordinaasi dan konsultasi SKPD;
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - i. Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - 1.6 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;

- c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 1.7 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - 1.8 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan;
 - c. Pemeliharaan Mebel;
 - d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - f. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 1.9 Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - b. Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
 - c. Pelaksanaan *medical check up* DPRD.
 - 1.10 Layanan administrasi DPRD, meliputi sub kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;
 - b. Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
 - c. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi kegiatan :
 - 2.1 Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;
 - b. Pembahasan rancangan perda;
 - c. Penyelenggaraan kajian peundang-undangan;

- d. Fasilitasi penyusunan /penjelasan/ keterangan dan / atau naskah akademik;
 - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 2.2 Pembahasan kebijakan anggaran, meliputi sub kegiatan :
- a. Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - c. Pembahasan APBD;
 - d. Pembahasan APBD perubahan;
 - e. Pembahasan pertanggungjawaban APBD.
- 2.3 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi, sub kegiatan :
- a. Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum;
 - b. Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur;
 - c. Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 - d. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian;
 - e. Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- 2.4 Peningkatan kapasitas DPRD, meliputi sub kegiatan :
- a. Orientasi DPRD;
 - b. Pendalaman Tugas DPRD;
 - c. Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - e. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - f. Penyusunan program kerja DPRD;
 - g. Publikasi dan Dokumentasi DPRD.
- 2.5 Penyerapan penghimpunan aspirasi masyarakat, meliputi sub kegiatan :
- a. Kunjungan kerja dalam daerah;
 - b. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - c. Pelaksanaan reses.
- 2.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- a. Penyusunan Kode Etik DPRD;
- 1.7 Fasilitasi tugas DPRD, meliputi sub kegiatan :
- a. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
 - b. Penyusunan laporan kinerja DPRD;

c. Fasilitasi tugas pimpinan DPRD.

Adapun tabel rencana kerja dan pendanaan pada program dan kegiatan prioritas dan subkegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kab. Demak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						57.947.855.500,00						64.077.642.304,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						57.947.855.500,00							64.077.642.304,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						57.947.855.500,00							64.077.642.304,00	
1,	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Ditindak Lanjuti</i>	-			100 %	41.146.040.368,00						-	44.944.782.619,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Daerah</i>	-			3 dokumen	29.100.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	65.887.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				10 Dokumen	5.900.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	900.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	900.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	600.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>				2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	63.487.400,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOM POK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			<i>Kinerja SKPD</i>													
	4.02.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen laporan keuangan</i>	-			1 dokume n	4.230.819.000,0 0			-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	4.522.769.797,0 0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				28 Orang/b ulan	3.759.855.000,0 0	Kab. Demak, Wonosal am, Jogoloyo	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD), DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOK ASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		3.998.868.997,0 0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokume n	470.964.000,00	Kab. Demak, Wonosal am, Jogoloyo	DANA TRANS FER UMUM -DANA ALOK ASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		523.900.800,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.395.300,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	3.395.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	3.395.300,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	3.395.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan</i>	-			1 laporan	179.200.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	204.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	18.200.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	1.820.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				110 Orang	161.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	202.630.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>terpenuhinya administarsi umum kantor kecamatan Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	-			0 % 0 bln 100 Persen	612.624.366,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	652.430.872,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	29.504.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	2.950.400,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	210.999.700,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	187.232.700,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	36.714.200,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	129.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	20.115.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	20.115.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				96 Laporan	182.351.466,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	220.192.772,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				2 Dokumen	12.900.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	12.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	5.040.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	5.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan Jumlah BMD yang diadakan	-			17 Unit 0 bln	702.970.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	1.066.716.440,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	702.970.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		89.020.440,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		327.696.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia</i>	-			100 Persen	1.196.341.714,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	1.374.531.060,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		28.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	558.441.714,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		773.431.060,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	622.900.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		572.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah BMD yang Terpelihara</i>	-			82 Unit	967.265.840,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	1.046.963.602,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	80.333.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		99.310.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				21 Unit	339.118.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		339.128.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				30 Unit	15.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				53 Unit	81.620.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	81.620.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				7 Unit	350.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	315.710.762,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				50 Unit	41.194.840,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	41.194.840,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>				19 Unit	60.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<i>Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan DPRD</i>	-			0 org	31.489.504.148,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	34.841.214.148,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>				50 Orang/Bulan	30.754.504.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	34.042.078.148,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>				5 Paket	660.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	724.136.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>				50 Orang	75.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>Terpenuhinya kebutuhan administrasi kegiatan DPRD</i>	-			50 org	1.734.820.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	1.166.424.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</i>				3 Dokumen	637.750.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>				12 Laporan	628.400.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	687.754.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>				4 Paket	468.670.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	468.670.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2,	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase Rencana Kerja Tahunan DPRD yang difasilitasi</i>	-			85 persentase	16.801.815.132,00					-	19.132.859.685,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang diselesaikan</i>	-			22 Dokumen	3.456.069.500,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	3.792.437.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				1 Dokumen	154.300.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	155.422.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>				15 Dokumen	2.194.482.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	2.483.198.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>				1 Dokumen	154.300.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	450.817.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>				6 Dokumen	603.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	703.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	349.987.500,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan(KUA PPAS Perubahan,Murni ,ABPD Perubahan dan APBD Murni)	-			5 dokumen	3.405.446.500,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	4.030.417.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	778.111.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		611.496.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	778.111.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		611.496.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	293.002.500,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		626.841.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>				1 Dokumen	778.111.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		1.569.087.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>				1 Dokumen	778.111.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		611.496.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	-			6 dokumen	2.141.214.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	2.180.583.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>				1 Laporan	209.004.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	209.004.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				1 Laporan	209.004.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	209.004.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>				1 Dokumen	652.599.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	611.496.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>				1 Dokumen	652.599.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	569.087.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase meningkatnya kompetensi anggota DPRD</i>	-			31 dokumen	3.985.655.632,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	4.013.584.700,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>				1 Dokumen	485.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				5 Dokumen	1.663.730.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	2.418.568.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				6 Orang	204.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	204.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				7 Orang	210.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>				12 Dokumen	375.303.200,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	302.953.200,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>				1 Dokumen	286.589.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	208.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				12 Dokumen	761.033.432,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	669.773.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat</i>	-			151 Dokumen	2.046.699.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	2.891.561.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				60 Laporan	240.900.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	755.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	286.589.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	301.166.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				100 Dokumen	1.519.210.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	1.835.395.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Tersusnya kode etik DPRD</i>	-			1 dokumen	100.000.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>				0 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitas Tugas DPRD	-			56 dokumen	1.666.730.500,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	2.224.275.985,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				8 Dokumen	900.000.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	1.076.856.985,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				15 Laporan	372.214.000,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	349.386.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				48 Dokumen	394.516.500,00	Kab. Demak, Wonosalam, Jogoloyo	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	798.033.000,00	SEKRETARIAT DPRD

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Demak Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang, subbidang-subbidang, dan seluruh staf/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Demak secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;
 - b. menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 yang dilaksanakan secara triwulan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Demak Tahun 2024 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja 2024 maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengkomunikasian/sosialisasi renja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari renja;
- c. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja yang telah dibuat.

Lampiran 1.

PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021-2026

DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Ditindak Lanjuti</i>							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Ditindak Lanjuti</i>	
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
		01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
		01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
		01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
		01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
		01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						01	2.04		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
		01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
		01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen			01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
		01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
		01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
		01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
		01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
		01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
		01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
		01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
		01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
		01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit			01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit
		01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit			01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit
		01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
		01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan			01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan
		01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket			01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket
		01	2.15	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Terlaksananya <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Orang			01	2.15	0003	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Terlaksananya <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Orang
		01	2.16		Layanan Administrasi DPRD						01	2.16		Layanan Administrasi DPRD			

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen			01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen
		01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan			01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan
		01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket			01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan /atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan /atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	204	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen									
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen
									4	02	02	204	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			

SEMULA									MENJADI								
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen